



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2022-2023**

SELASA, 10 JANUARI 2023

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR;**
- **Para Anggota DPR;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022–2023.

Selamat datang bagi seluruh Anggota DPR RI yang baru saja kembali dari kegiatan bersama konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh Anggota DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga pada Tahun 2023, kita dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Kita memasuki tahun 2023, yang merupakan tahun politik, dimana semua partai politik peserta pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat.

Anggota DPR RI yang juga adalah anggota dari Partai Politik, akan berada dalam situasi dan kondisi dinamika politik menghadapi pemilu tahun 2024. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI tetap berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat; mensejahterahkan rakyat; dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar

semakin maju; maka diperlukan Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas; dibutuhkan Partai Politik peserta Pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkuat Persatuan Bangsa.

DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengawali tahun baru ini, sejumlah agenda penting dan strategis telah menanti untuk diselesaikan sesuai fungsi konstitusional DPR RI.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.

Pemerintah menilai bahwa Perppu tersebut sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mengamanatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DPR RI sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai pemenuhan parameter sebagai kepentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan menilai substansi yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-

langkah berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan cipta kerja.

Dalam pembahasan Rancangan Undang Undang, DPR RI bersama dengan Pemerintah akan melanjutkan pembahasan 11 (*sebelas*) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan tingkat I dan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Pada masa sidang yang lalu, DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023. Penetapan Prolegnas Prioritas ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional dan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara.

DPR RI, dalam menjalankan fungsi legislasi, akan berpedoman pada landasan konstitusi, sosiologis, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada tahun 2023 ini, berbagai proyeksi perekonomian global masih berada dalam tantangan, gejolak, dan ketidakpastian. Bahkan IMF memperkirakan dua pertiga ekonomi dunia akan berada di jurang resesi di tahun ini.

Perekonomian Indonesia, tentu saja akan terpengaruh. Kinerja positif perekonomian nasional selama tahun 2022 diharapkan dapat menjadi landasan yang memadai bagi gerak perekonomian nasional pada tahun 2023.

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional.

Pemerintah harus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang tidak kondusif.

Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus dilakukan secara efektif.

Pemerintah agar tertib dalam menjalankan APBN 2023, sesuai dengan Kebijakan fiskal, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Belanja Pemerintah Pusat, yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI, yang telah menjadi kesepakatan bersama.

DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain:

1. Permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem;
2. Penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku;
3. Permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk anak;
4. Permasalahan tenaga honorer;
5. Pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan, akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program,

serta pengelolaan anggaran berjalan dan dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor.

Fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan Undang Undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan.

DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra kerja maupun rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR RI.

DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa persidangan ini, DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarparlemen.

Selain pada kerja sama multilateral, pertemuan bilateral juga akan dilakukan oleh parlemen Indonesia dengan berbagai negara, yaitu Korea Selatan, Afrika Selatan, Uni Eropa, serta Polandia.

Pada tahun ini menjadi tahun yang membanggakan, di mana DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet Presidensi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia. Keketuaan Indonesia di ASEAN diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar serta berbagai tantangan lainnya, termasuk stabilitas kawasan.

Sebagai tuan rumah pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, berbagai persiapan sedang dilakukan untuk mensukseskan penyelenggaraan sidang AIPA tersebut.

Atas nama Pimpinan, Kami mengundang seluruh Bapak Ibu yang terhormat Anggota DPR RI untuk ikut mensukseskan bersama Presidensi Parlemen ASEAN yang dapat membawa kemajuan bersama ASEAN.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikian pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada Masa Persidangan III dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI. Dalam Masa Persidangan III ini DPR RI akan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Rencana kerja DPR RI secara umum yang telah disampaikan ini, agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia, untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI.

Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022–2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 10 Januari 2023 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan "SELAMAT BEKERJA MENSEJAHTERAHKAN RAKYAT"

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

➤ **Daftar Rancangan Undang-Undang yang masih berada dalam Proses Pembahasan Tingkat I:**

1. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen;
2. Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran;
6. *Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

➤ **Daftar Rencana Ratifikasi yang masih berada dalam Proses Pembahasan Tingkat I:**

12. Rencana Pengesahan Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (*Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen kedelapan Bidang jasa Keuangan dalam bentuk*

persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang Jasa);

13. Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).

➤ **Sidang yang akan dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:**

1. Sidang Pleno ke-13 Asean Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki;
2. Sidang Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Aljazair;
3. Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi (SEAPAC) di Indonesia;
4. Sidang IPU 146 di Bahrain.